

PIDATO KENEGARAAN

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005
SERTA NOTA KEUANGANNYA**

**DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 2004**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Presiden Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Lembaga-lembaga Tinggi Negara,

Yang Mulia para Duta Besar dan pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,

Hadirin yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Sebelum saya menyampaikan keterangan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam kurun 2001-2004 kepada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, izinkanlah

saya mengajak kita semua untuk kembali memanjatkan puji syukur yang setulus-tulusnya ke hadhirat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada bangsa dan negara kita.

Puji dan syukur itu sungguh perlu, karena bagaimanapun hanya dengan kehendak-Nya saja, bangsa dan negara kita mampu melampaui segala cobaan yang berat dan dengan selamat mencapai tahapan seperti sekarang ini. Kita semua paham dengan cobaan yang berat dan kompleks tadi. Dengan segala daya dan upaya, kita akhirnya menyelesaikan berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh gejolak moneter, berikutan akibatnya yang demikian luas serta hampir melumpuhkan sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi kita. Bersamaan dengan itu, kita juga memikul tugas untuk meneruskan cita-cita reformasi dalam semua segi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Bersama berbagai eksekusi yang penyelesaiannya juga tidak ringan, kesemuanya tadi merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Kita semua menjadi saksi, betapa sulitnya penyelesaian konflik dan ancaman disintegrasi dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Walau dengan sangat susah payah, kita dapat mengakhiri krisis tadi berikutan dampaknya. Keberadaan kita sebagai satu bangsa tetap dapat kita pertahankan. Negara Kesatuan kita, juga masih tetap dapat kita tegakkan. Stabilitas pemerintahan kita, khususnya dalam hubungan antara pemerintah di pusat dengan daerah, dapat kita pelihara dan kian berjalan kearah yang lebih mantap. Sekalipun belum tuntas, kita telah melampaui bagian terberat dari situasi transisional yang lazim hadir dalam setiap gerak perubahan. Kita tidak perlu ragu mengakui, bahwa secara bersama-sama, kita telah menyelesaikan sebagian terbesar pekerjaan reformasi itu.

Tidak satu golongan pun yang dapat dan berhak mengklaim, bahwa semua kemajuan yang kita capai adalah kinerja golongannya sendiri. Bahkan Pemerintah-pun juga tidak. Kemajuan besar kecil yang kita capai tanpa kecuali adalah prestasi seluruh kalangan dan lapisan, baik lapisan kepemimpinan maupun oleh rakyat kita sendiri.

Kita perlu menekankan secara khusus peranan rakyat ini. Dalam dua kali Pemilihan Umum baru-baru ini kita disuguhi fenomena politik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari 148 juta lebih pemilih yang terdaftar, 124 juta lebih atau lebih dari 83% telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Persentase yang tinggi juga kita saksikan dalam Pemilihan Umum tanggal 5 Juli, yang untuk pertama kali memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Dari 155 juta pemilih yang terdaftar, lebih dari 121 juta orang atau 78% telah menggunakan haknya dalam pemilihan putaran pertama. Tingginya angka atau persentase tersebut menunjukkan bahwa rakyat kita sudah mempunyai kesadaran dan kemauan politik yang matang. Mereka mampu memberikan keputusan politiknya secara mandiri, yang bisa berbeda banyak dari apa yang diarahkan atau yang diinginkan oleh para pemimpinnya. Lebih dari itu, tidak sekalipun terjadi kekerasan antar para pengikut partai atau tokoh yang ikut dalam Pemilihan Umum yang lalu, apalagi yang sampai mengorbankan nyawa. Sungguh luar biasa. Karena itu, adalah merupakan harapan kita semua, bahwa dalam Pemilihan Umum putaran kedua bulan September nanti, keadaan yang lama atau bahkan lebih baik, dapat berlangsung lagi.

Para pemimpin masyarakat, bangsa, dan negara kita perlu menyambut perkembangan itu dengan penuh keikhlasan dan rasa hormat, karena secara konstitusional kedaulatan tertinggi negara ini memang terletak dalam tangan rakyat Indonesia sendiri. Bersamaan dengan itu adalah jelas pula, bahwa sejak saat itu seluruh pemimpin harus lebih tekun, lebih tulus, dan lebih rajin mendengarkan suara rakyatnya, baik yang disampaikan dengan riuh rendah, maupun yang dikirimkan melalui pesan secara pelan dan acapkali dengan cara tidak langsung. Dengan perkataan lain, inilah momennya bagi para pemimpin Indonesia --termasuk saya sendiri-- untuk lebih banyak mengadakan koreksi diri. Koreksi diri para pemimpin ini adalah wajar dan manusiawi, oleh karena hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang bebas dari kekhilafan.

Oleh karena itu, seraya meminta maaf kepada para undangan termasuk Yang Mulia para warga Korps Diplomatik, adalah pada

tempatny bila Pidato Kenegaraar sekarang ini selain saya tujukan kepada Saudara-saudara Anggota DPR RI yang --bersama para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nanti-- secara formal mewakili seluruh rakyat Indonesia, juga saya tujukan secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang melalui media massa dapat mengikuti acara ini dari tempatnya masing-masing.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
Sidang yang saya muliakam,

Selain dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke 59 dan mengantar RAPBN Tahun 2005, Pidato Kenegaraan kali ini bersamaan dengan akan segera berakhirnya masa bakti baik para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, maupun pemerintahan yang saya pimpin sekarang ini. Dalam pemahaman saya, adalah kewajiban dan sekaligus kehormatan yang luar biasa bila kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang kita emban dengan sebaik-baiknya, sehingga siapa pun berikutnya yang akan dipercaya rakyat untuk meagemban amanahnya nanti, dapat memulai kiprahnya pada tataran yang lebih baik dan lebih maju dari pada kondisi yang kita dapa_i dan kita tangani bersama pada awal Reformasi Nasional enam tahun yang lalu.

Dalam laporan pelaksanaan tugas yang saya sampaikan tanggal 1 Agustus 2003, saya telah meminta perhatian tentang betapa luas dan kompleksnya perubahan yang telah, sedang, dan akan dialami negara kita. Perubahan tersebut sama sekali bukanlah perubahan sebagian demi sebagian, tetapi bersifat menyeluruh. Yang masih kita pertahankan secara utuh da am tatanan yang sedang berubah ini hanyalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang selain merupakan dokumen historis mengenai visi kenegaraan yang melandasi pembentukan Negari Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya juga merupakan suatu kontrak politik yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh bangsa kita yang bermasyarakat majemuk ini. Dengan kata lain, semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 harus tetap hidup dalam keseharian kita, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa di pelosok yang jauh.

Kita memang perlu menjadikan semangat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagai rujukan dasar yang dinamis bagi kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap lapisan dan golongan dalam bangsa kita yang bermasyarakat majemuk ini perlu secara sadar dan berkelanjutan mendalami, mensosialisasikan, dan mengaktualisasikan norma-norma Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kepada kalangannya sendiri, bukan hanya kepada mereka yang sudah dewasa, tetapi juga bagi generasi mudanya. Bagaimana pun proses pembangunan bangsa -- *nation building*-- memang belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah selesai dalam dunia yang berkembang secara sangat dinamis ini.

Sebabnya sederhana. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah satu-satunya kerangka acuan ideologi nasional kita, yang memungkinkan bangsa kita yang bermasyarakat sangat majemuk ini bisa hidup dan bekerjasama sebagai satu Bangsa dan dalam satu Negara yang utuh. Untuk meyakinkan diri kita masing-masing, rasanya perlu, kita sesekali bertanya dalam hati kita masing-masing: akan adakah suatu Indonesia yang bersatu tanpa kesepakatan dan kesetiaan kita dalam melaksanakan dan mewujudkan esensi nilai yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut? Saya rasa jawabannya adalah: tidak akan pernah ada.

Kealpaan kita dalam memahami, mensosialisasikan, dan mengaktualisasikan norma-norma Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kedalam kalangan kita masing-masing, dapat menimbulkan akibat yang jauh, karena setiap lapisan dan golongan jelas akan mempunyai dinamika kehidupannya sendiri. Tanpa dikaitkan dengan konteks kebangsaan, dinamika kehidupan internal golongan ini bisa terjebak dalam lingkaran aspirasi, kepentingan, bahkan obsesi yang sempit, dan menyebabkan lapisan dan golongan yang bersangkutan kehilangan orientasi kebangsaan, dengan akibat yang bahkan membahayakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita secara menyeluruh.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Dengan awalan tadi, seka ang saya akan menyampaikan keterangan mengenai jalannya pemerintahan,sejak saya mengucapkan sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia bulan Juli 2001 sampai bulan Agustus 2004 ini.

Sudah barang tentu, data waktu yang terbatas ini saya hanya akan mengedepankan substansi yang bernilai kebijakan dan bersifat strategis saja. Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis dan detail, dapat diperiksa dan di ditelaah dalam Lampiran Pidato Kenegaraan ini.

Substansi keterangan ini kan tetap merujuk pada enam program Kabinet Gotong Royong yang saya pimpin, yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari berbagai Ketetapan MPR. Enam program Kabinet Gotong Royong tersebut terdiri dari: 1) Mempertahankan persatuan dan tesatuan bangsa dalam kerangka NKRI; 2) Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap HAM; 3) Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat; 4) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, dan melanjutkan pemberantasan KKN; 5) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri term suk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah; dan 6) Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia, dan langsung.

Seperti juga halnya dengan keterangan yang saya sampaikan secara berturut-turut dua tahun yang lalu, enam program tersebut saya kelompokkan dalam tiga bidang, yaitu Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Keuangan, serta Kesejahteraan Rakyat. Tetapi Sesuai

dengan prioritas perhatian kita semua, kali ini urutannya sedikit saya ubah, dengan mendahulukan bidang Ekonomi dan Keuangan serta bidang Kesejahteraan Rakyat, untuk selanjutnya baru memaparkan bidang Politik dan Keamanan.

Di bidang Ekonomi dan Keuangan, kegiatan pemulihan berbagai kesulitan akibat gejolak moneter dalam kurun tiga tahun masa bhakti pemerintahan sekarang ini benar-benar merupakan tugas dan tantangan yang terberat. Sebab, upaya pemulihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan keuangan berjangka pendek, tetapi juga terkait erat dengan bidang-bidang lainnya dalam kerangka besar gerakan reformasi nasional. Artinya, upaya pemulihan ekonomi dan keuangan yang dilakukan pemerintah tahun demi tahun, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menyesuaikan diri dengan dinamika arah perkembangan politik dan ekonomi nasional, yang tercantum dalam demikian banyak ketetapan MPR dan undang-undang.

Sekedar menyalahkan masa lampau memang bukanlah sikap yang konstruktif, dan tidak banyak membantu penyelesaian masalah yang kita hadapi. Sekalipun demikian, kali ini hal tersebut harus kita telaah mengapa kita bisa terpuruk demikian lama, sementara negara-negara lain yang sama-sama didera krisis tujuh tahun yang lalu, sudah mulai pulih atau hampir pulih.

Baik Bank Dunia maupun IMF telah banyak membantu kita, dan untuk itu kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Namun perlu pula kita simak, bahwa IMF sendiri dengan jujur dan terbuka telah mengakui adanya kekeliruan dalam rekomendasi yang disampaikan mereka kepada Pemerintah kita dalam tahun 1997. Masalahnya, kekeliruan itu jugalah yang menjadi cikal bakal kebijakan bantuan likuiditas yang hampir membangkrutkan sistem moneter kita. Sesungguhnya, sekedar pengakuan terhadap kekeliruan memang belumlah cukup, karena sampai saat ini kita masih harus menanggung akibat dari kekeliruan rekomendasi tersebut.

Adalah benar, bahwa sebagian tanggungjawab tersebut berada di atas pundak kita sendiri, oleh karena pelaksanaan rekomendasi

tersebut memang tergantung pada persetujuan kita. Namun adalah juga wajar --bahkan sangat wajar-- jika IMF secara profesional dan proaktif mengambil *remedial actions*, antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang dapat membantu meringankan beban hutang nasional kita yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan rekomendasi kebijakannya itu. Setidaknya, IMF bersedia memprakarsai *reschedulling* cicilan hutang-hutang kita, agar tersedia lebih banyak dana untuk pembangunan kesejahteraan rakyat kita

Seluruhnya itu saya sampaikan sebagai negara anggota IMF yang baik, yang selain dengan setia mengangsur hutang nasional kita beserta bunganya tepat pada waktunya, juga mematuhi setiap kesepakatan yang kita buat setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF. Selama ini kita sudah mendengarkan saran dan rekomendasi mereka, dan sudah saatnya kini mereka juga mendengarkan keluhan kita yang wajar dan absah, dan berbuat sesuatu untuk memelihara dan memulihkan reputasi mereka dalam pandangan kita. Karena itulah, untuk tidak memperpanjang kesulitan yang timbul akibat krisis moneter tahun 1997 yang lalu, di tahun 2003, sesuai amanat dalam TAP Nomor VI/MPR/2002 ataupun Keputusan Nomor 5/MPR/2003, saya mengambil keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan IMF Dalam skala yang lebih luas, langkah tadi juga dimaksudkan sebagai upaya mengurangi secara bertahap ketergantungan kita pada hutang luar negeri serta sekaligus meningkatkan upaya kemandirian kita.

Untuk itu, pemerintah men rapkan Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya kerjasama dengan IMF, yang ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tabun 2003. Sampai saat ini, sekitar 80% dari Rencana Aksi yang terdapat dalam Paket Kebijakan tersebut sudah diselesaikan, dan Pemerintah bertekad untuk menyelesaikan sebaik-baiknya sisa Rencana Aksi lainnya sebelum masa bakti Kabinet Gotong Royong ini berakhir. Keberhasilan pelaksanaan pemerintah menjalankan Paket Kebijakan Ekonomi itu telah membantu menjaga stabilitas ekonomi makro dalam masa transisi pasca kerjasama dengan IMF tersebut.

Pengurangan ketergantungan terhadap bantuan asing dan peningkatan kemandirian tadi juga penting karena beberapa pertimbangan. Dari waktu ke waktu, pada tataran internasional juga semakin mengerucut pemikiran, bahwa sumber dana pembangunan harus dapat dimobilisasi di dalam negeri. Masalah ini perlu benar-benar kita pikirkan, apalagi dalam kerangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2003, saat ini pemerintah telah menyusun sebuah rencana tindak. Sesuai sasaran KTT tadi, rencana tindak yang harus segera disusun dalam Program Pembangunan Nasional yang menjangkau antara lain upaya pengentasan kemiskinan, perluasan akses pada air bersih dan sanitasi, pengurangan tingkat kematian bayi dan anak balita, perlindungan lingkungan, penciptaan iklim investasi, dan dorongan bagi peningkatan perdagangan internasional.

Semua itu jelas memerlukan dana, dan harus mulai dapat digali dari dalam negeri. Dalam rangka penggalan dan mobilisasi sumber dana pembangunan di dalam negeri itulah, pemerintah mulai mengembangkan pasar obligasi pemerintah (*Government's Bond*), baik domestik maupun internasional. Adalah menggembirakan bahwa obligasi pemerintah senilai 1 miliar dollar AS dengan suku bunga 6,75 % untuk jangka 10 tahun, yang diterbitkan bulan Maret yang lalu, mendapat sambutan baik terutama di pasar luar negeri. Bagaimanapun, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kepercayaan internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Untuk pertama kalinya, dalam kurun waktu 2001-2004 kita juga mampu menunjukkan hasil pengumpulan pajak sebesar Rp 778,1 triliun, yang secara total melampaui pendapatan pajak selama tiga puluh dua tahun terakhir, yang hanya mencapai Rp 670,2 triliun.

Dalam kaitannya dengan penggalan sumber dana pembangunan di dalam negeri ini, saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh kontroversi yang berkembang dalam masyarakat kita sehubungan dengan privatisasi BUMN. Sebagai kebijakan, privatisasi dilaksanakan sesuai dengan amanah dan fungsi bujeter, serta dilakukan dengan tata-cara sebagaimana diarahkan dalam

Undang-undang BUMN ataupun Undang-undang Keuangan Negara. Bahwa telah timbul masalah pada pelaksanaan beberapa program privatisasi tersebut, hal itu jelas perlu memperoleh perhatian bagi penyempurnaannya.

Bersisian dengan berbagai kenyataan yang seringkali terasa menyesakkan itu, kita terus becerja. Setapak demi setapak kita bergerak maju. Kita menyelesaikan keruwetan yang melanda perbankan akibat krisis moneter tahun 1997. Satu demi satu kita menyelesaikan masalah, sambil terus memperkuat fondasi dan kemampuan ekonomi nasional. Sedikit demi sedikit kita memperbaiki kerusakan pada infrastruktur perekonomian kita.

Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan kebijakan stabilisasi ekonomi makro dalam rangka mencegah semakin menurunnya kegiatan ekonomi akibat krisis yang terjadi sejak tahun 1997. Langkah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan sektor riil dimasa yang akan datang.

Dengan kebijakan tersebut, sejak tahun 2002 stabilitas ekonomi membaik, dan hal itu ditandai oleh stabilitas nilai tukar rupiah, menurunnya laju inflasi dan suku bunga, meningkatnya ketahanan fiskal, Berta meningkatnya cadaigan devisa.

Pada tahun 2003 nilai tukar rata-rata rupiah mencapai Rp 8.572 per 1 dollar AS atau menguat 16,4 % dibandingkan dengan tahun 2001. Sedangkan laju inflasi menurun menjadi 5,1 % atau lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Rata-rata tertimbang suku bunga SBI 3 bulan juga turun menjadi 8,3 %, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2001 yaitu sebesar 17,6 %. Demikian pula defisit APBN menurun menjadi 2,1 % dari PDB, lebih rendah dibandingkan tahun 2001 yaitu sebesar 2,8 % dari PDB. Stok utang pemerintah juga mengalami penurunan menjadi sekitar 69 % dari PDB, jauh menurun dibandingkan tahun 2001 yaitu sekitar 87 % dari PDB. Cadangan devisa meningkat menjadi 36,3 miliar dollar AS atau sekitar 8 miliar lebih besar dibandingkan akhir tahun 2001. Peningkatan stabilitas dan kinerja ekonomi makro tersebut telah memberikan dorongan kepercayaan pasar modal. Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta meningkat menjadi 691,9 atau 76,5 % lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2001.

Stabilitas moneter yang membaik juga didukung oleh perbankan yang makin sehat. Pada periode 2001 sampai 2003, rasio kecukupan modal stabil sekitar 20 % jauh diatas ketentuan batas minimum rasio kecukupan modal yaitu sebesar 8 %. Dalam periode yang sama, jumlah kredit bermasalah juga menurun tajam dari 12,1 % menjadi 8,2 %. Pada akhir tahun 2003 jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat meningkat sebesar 15,4 % per tahun dibandingkan akhir tahun 2001, termasuk didalamnya penyaluran kredit usaha kecil yang meningkat sebesar 32,9 % per tahun dalam periode yang sama. Dengan meningkatnya dana yang disalurkan kepada masyarakat maka rasio antara pinjaman terhadap deposito, meningkat dari 33 % pada akhir tahun 2001 menjadi 43,2 % pada akhir tahun 2003.

Peningkatan kinerja perekonomian Indonesia juga ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 3,5 % pada tahun 2001 menjadi 4,1 % pada tahun 2003. Pertumbuhan ekonomi ini memang relatif lebih rendah dari yang diharapkan, antara lain disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dunia, dan peningkatan persaingan di kawasan regional dalam menarik dana investasi. Jangan dilupakan, bahwa praktis ditengah rendahnya kegiatan investasi asing, kita tetap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut..

Pemerintah menyadari masih banyak masalah yang belum terselesaikan dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor. Masalah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: faktor ketenagakerjaan, kepastian hukum, pelaksanaan otonomi daerah dan kesiapan infrastruktur. Namun demikian pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam perbaikan iklim investasi untuk mencapai target yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan ini, masalahnya terutama terletak pada belum terwujudnya hubungan

industrial secara harmonis. Meningkatnya gejolak unjuk rasa mulai dari tuntutan terhadap kenaikan upah dan peningkatan kesejahteraan hingga penolakan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Untuk memperbaiki iklim investasi, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian RUU tentang Penanaman Modal yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum berinvestasi, termasuk dalam pemberian perlakuan yang sama kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Kepastian hukum juga ditingkatkan melalui harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sampai dengan bulan Juli 2004 telah dilakukan evaluasi terhadap sekitar 3.600 PERDA. Sebagai hasilnya, 267 PERDA dibatalkan dan 44 PERDA dibatalkan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Penerbitan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap kegiatan investasi di bidang pertambangan.

Untuk menyederhanakan prosedur perizinan investasi, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem Pelayanan Satu Atap. Langkah ini dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelayanan investasi. Pemerintah juga telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pelayanan kelembagaan dalam penanganan berbagai hambatan yang dihadapi penanam modal termasuk masalah-masalah yang bersifat lintas sektoral dan lintas daerah seperti keamanan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.

Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut secara bertahap minat penanaman modal mulai dapat ditingkatkan. Pada kurun waktu 2001 sampai Juni 2004 angka persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai 720 proyek dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 149,9 triliun. Sedangkan angka persetujuan penanaman modal asing (PMA) mencapai 4.085 proyek dengan nilai rencana

investasi sebesar 41,5 miliar dollar AS. Selanjutnya untuk periode yang sama, izin usaha tetap PMDN mencapai 409 proyek dengan nilai realisasi sebesar Rp 41,4 triliun dan izin usaha tetap PMA sebanyak 1.650 proyek dengan nilai realisasi sebesar 13,9 miliar dollar AS. Angka persetujuan dan realisasi investasi tersebut di atas tidak termasuk investasi di sektor migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, pertambangan, investasi portofolio dan investasi rumah tangga.

Di bidang ketenagalistrikan, pemerintah telah melakukan restrukturisasi dan reformasi melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang menggantikan Undang-undang yang lama. Langkah lainnya adalah penyelesaian renegotiasi 26 proyek listrik swasta. Adapun hasil dari program peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap infrastruktur ketenagalistrikan, ditandai oleh rasio desa yang sudah teraliri listrik mencapai 78,5 % pada tahun 2003.

Di bidang infrastruktur jalan, dengan segala keterbatasan yang ada pemerintah telah berhasil mengurangi kerusakan jalan nasional dari 15 % pada tahun 2001 menjadi 12 % pada akhir tahun 2003, sehingga dapat memberikan penghematan biaya operasi kendaraan secara cukup signifikan. Selain itu untuk mendukung pusat-pusat produksi nasional dan outlet bagi produksi yang dihasilkan, pemerintah telah melakukan peningkatan struktur jalan dan jembatan antara lain di jalur Pantai Utara Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas Kalimantan dan Lintas Sulawesi. Sedangkan dalam rangka membuka daerah terisolir dan untuk mendukung kawasan perbatasan, telah dilakukan pembangunan jalan baru antara lain pada ruas jalan Jayapura-Wamena, Lintas Flores dan Seram serta jalan di perbatasan Kalimantan, Papua, NTT dan pulau-pulau kecil. Pembangunan jalan juga dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah di jalan lintas selatan Jawa, lintas barat Sumatera, dan pembangunan Jembatan Suramadu. Termasuk dalam pembangunan lintas barat Sumatera adalah pembangunan jalan Ladia Galaska di Nanggroe Aceh Darussalam, yang sesungguhnya diminta oleh masyarakat di bagian selatan Provinsi tersebut, untuk membedah isolasi bagian

wilayah mereka. Untuk itulah, jalan yang membentang dari pantai timur ke pantai barat tersebut dibangun.

Di sektor pertanian, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, kita juga mencatat kemajuan. Pada periode 2000-2003 Produk Domestik Bruto dalam sektor pertanian, tumbuh rata-rata 2 % per tahun lebih tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya yang hanya tumbuh rata-rata 0,6 % per tahun.

Namun dibalik capaian angka-angka di sektor pertanian tadi, penting kita perhatikan kondisi disekitar masalah pertanahan, yang praktis menjadi simpul pertemuan berbagai kepentingan di sektor pertanian. Di bidang ini kita menyaksikan masih besarnya potensi konflik pertanahan, tentang hubungan antara tanah dan petani, tentang masyarakat hukum adat serta hak-hak mereka atas tanah, dan akhirnya tentang pembaharuan agraria serta pengelolaan sumber daya alam, yang arah kebijakan serta strategi penyelesaiannya, telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Dengan sepenuhnya menyadari kompleksitas permasalahan disekitar pertanahan tadi, khususnya dalam kaitan dengan penuntasan penataan ruang dan berbagai kegiatan pengolahan kekayaan alam, pemerintah telah mulai melaksanakan penyusunan konsepsi pembaharuan agraria. Pada saat ini, pokok-pokok konsepsi tadi telah mendapatkan bentuk, walau penjabarannya masih memerlukan pengujian lagi.

Dalam kaitannya dengan pembaharuan agraria tersebut, pemerintah menyambut baik prakarsa Komnas HAM yang melalui kerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah, berusaha mengambil langkah-langkah mendasar dalam penanganan masalah agraria ini, yang jelas terkait dengan perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya dari rakyat kita.

Masih dalam kaitannya dengan masalah pertanian dan agraria ini, perhatian yang besar juga perlu diberikan terhadap ancaman yang akan dihadapi generasi mendatang dari pengurasan sumberdaya alam serta kemerosotan kualitas lingkungan hidup tersebut.

Terhadap pengurasan kekayaan alam secara tidak syah di laut, saya telah menyetujui dilakukannya tindakan yang lebih keras

seperti penembakan dan penenggelaman kapal-kapal oleh TNI-AL. Demi tegaknya hukum dan demi terpeliharanya kekayaan alam negara kita untuk generasi mendatang, saya berharap hakim-hakim kita mempunyai cukup kearifan dan keberanian untuk menjatuhkan hukuman yang berat dan membuat jera para pencuri ikan tersebut, termasuk dengan menyita kapal-kapal mereka dan menghukum nakhoda serta awaknya seberat-beratnya.

Sidang yang saya muliakan,

Dengan segala kemajuan besar kecil yang secara terbatas sudah mulai kita capai dalam tahun-tahun terakhir ini, tetap saja kita masih harus menghadapi masalah pengangguran yang cukup berat, baik yang bersifat terbuka maupun yang terselubung. Sekalipun terdengar klasik, tetapi memang tidak akan mudah memecahkan soal ini tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang pada satu saat mampu menampung pertambahan akumulatif angkatan kerja, dan pada saat yang sama mampu mendorong penciptaan banyak lapangan kerja yang baru.

Masalah pengangguran jelas bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial budaya, bahkan juga masalah politik dan keamanan. Pengangguran terkait erat dengan kemiskinan, suatu keadaan kurangnya kemampuan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang paling dasar dalam hidup, seperti menyediakan sandang pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pengangguran dan kemiskinan bagaikan suatu lingkaran setan, yang menyebabkan sebagian besar rakyat kita bukan saja hidup dalam kepapaan, tetapi juga tidak mampu memanfaatkan demikian banyak peluang yang diberikan oleh dunia di sekitar kita. Sebagian besar tenaga kerja kita harus bersaing keras hanya untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan kasar yang berpenghasilan rendah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tidak kalah seriusnya adalah perlakuan buruk dan tidak manusiawi yang dialami oleh para pekerja migran kita dari majikannya, walaupun mereka memasuki negara lain secara legal. Pada satu dua negara, mereka telah memperoleh perhatian dan

perlindungan dari pemerintah negara yang bersangkutan, namun tidak jarang nasib mereka buruk dan tidak mendapatkan perlindungan sama sekali. Melalui jalur diplomatik, pemerintah telah melakukan hubungan dengan pemerintah negara-negara yang bersangkutan untuk memberikan perlindungan yang wajar sesuai dengan Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Pemulangan pekerja illegal kita yang mencari nafkahnya di negara tetangga kita Malaysia, yang jumlahnya kurang lebih 700 ribu orang, merupakan tambahan masalah yang sungguh memerlukan perhatian kita semua, terutama dari pemerintah daerah dari asal pekerja yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena untuk sebagian besar sifat illegal mereka hanya terkait dengan masalah kelengkapan dokumen-dokumen keimigrasian, yang sesungguhnya bisa ditangani dengan lebih baik oleh pemerintah daerah.

Untuk mencegah berlarutnya masalah yang penting ini, Pemerintah telah mengadakan *Memorandum of Understanding* dengan Kerajaan Malaysia, yang pada satu pihak menghormati kedaulatan negara tetangga kita tersebut, dan pada pihak lain memberikan peluang yang cukup kepada pekerja kita untuk secara syah mencari nafkah di negara itu.

Sidang yang saya muliakan,

Mengawali penjelasan di bidang Kesejahteraan Rakyat, saya ingin memulainya dari masalah-masalah yang secara pokok berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan dasar rakyat kita.

Dalam bidang pemeliharaan kesehatan rakyat secara berkelanjutan, dapat saya sampaikan, bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) telah dapat kita turunkan dari 46 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1997, menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2003. Sedangkan Angka Kematian Balita (AKBa) juga telah dapat diturunkan dari 79 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 46 per 1000 pada tahun 2003. Sementara itu Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan dari 334 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, angka

harapan hidup waktu lahir (UHH) terus meningkat, dan dewasa ini telah mencapai 66 tahun.

Walaupun masih menghadapi keterbatasan sumberdaya, dalam tiga tahun ini pemerintah juga tetap memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan kaum muda kita, sekalipun belum dapat memenuhi sepenuhnya arahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada tahun 2003 pelaksanaan wajib belajar 9 tahun menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, baik jumlah maupun mutunya. Begitu pula Angka Partisipasi Kasar (APK) mulai dari tingkat sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah hingga pendidikan tinggi.

Selain itu dalam tiga tahun terakhir ini kita juga telah dapat menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, walau upaya itu masih bejangka pendek jika dilihat dari segi Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Hingga tahun 2003, jumlah tersebut turun menjadi 37,3 juta dari 47,9 juta pada tahun 1999.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, bangsa dan negara kita memerlukan kebijakan serta strategi yang mendasar untuk memberdayakan masyarakat miskin tersebut, sedemikian rupa sehingga selain mampu keluar dari jeratan kemiskinan yang telah menghambat pengembangan potensi kemanusiaannya, juga mampu memberikan kontribusinya yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini.

Sesuai dengan tatanan kenegaraan serta tatanan pemerintahan dewasa ini, yang bertumpu pada konsep desentralisasi yang seluas-luasnya terutama pada daerah otonomi tingkat kabupaten dan kota, tanggungjawab serta kehormatan utama untuk mengembangkan serta melaksanakan kebijakan dan strategi yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia Indonesia yang lebih sehat, lebih terdidik, lebih aman, serta mampu mendayagunakan seluruh potensi rakyat itu sendiri, baik laki-laki dan perempuan, terletak pada pemerintah

kabupaten serta pemerintah kota, beserta seluruh kepemimpinan masyarakat yang berdiam di daerah tersebut. Pemerintah Pusat mempunyai tanggungjawab dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk terlaksananya tanggungjawab pemerintah daerah tersebut.

Dalam kaitannya dengan upaya perwujudan dan peningkatan kesejahteraan tadi, dapat disampaikan pula upaya pemerintah untuk melaksanakan amanah MPR-RI guna membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional. Rancangan Undang-undang yang dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraannya, saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, dan Insya Allah dapat segera selesai dan disahkan. Melalui skim penjaminan tadi, diharapkan setidaknya dapat segera dimulai pemberian jaminan sosial kepada kelompok masyarakat diluar Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dan para Pekerja. Apapun jenis dan seberapa besarnya manfaat yang untuk sementara dapat diwujudkan pada tahap awal nanti, tetapi pikiran dasarnya adalah, kita dapat selangkah lagi maju dalam memberikan kesejahteraan kepada serulur rakyat Indonesia.

Sidang yang saya muliakan,

Sekarang izinkan saya menjelaskan berbagai kegiatan yang dapat dicapai dalam bidang politik dan keamanan. Salah satu tantangan berat dalam bidang ini adalah menjaga keutuhan wilayah nasional sebagai wadah dan salah satu komponen utama negara kita dalam melaksanakan keseluruhan tugas nasional untuk menyejahterakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Saya percaya kita semua menyadari bahwa keutuhan wilayah kita ini bukan saja terancam oleh aksi gerakan separatis yang ada di beberapa daerah, tetapi juga oleh demikian meluasnya tindak penjarahan hutan serta kekayaan laut kita, oleh unsur-unsur kriminal yang memanfaatkan kelemahan aparaturnya penegak hukum serta angkatan perang kita. Adalah jelas bahwa untuk menjaga keutuhan wilayah negara dan untuk menjamin rasa aman seluruh penduduk, negara kita membutuhkan aparaturnya penegak hukum –termasuk

aparatur pertahanan dan keamanan-- yang selain mempunyai kemampuan profesional yang tinggi, kuat dan efektif.

Untuk mencapai sasaran itu, kita telah melaksanakan dan sedang menyelesaikan program reformasi TNI dan POLRI, yang dalam kurun sejarah yang lalu, sering mendapatkan tugas yang berada di luar bidang tugas pokoknya. Proses reposisi kedua institusi tersebut terus berlangsung. Kita sudah mengundang dua Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kedua undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI. RUU tentang TNI juga sudah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat untuk dibahas.

Dalam rangka penuntasan reposisi tadi perlu dicatat, bahwa tahun 2004 ini merupakan tahun terakhir keberadaan Fraksi TNI / POLRI dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. TNI dan POLRI sekarang dan nanti akan lebih berkonsentrasi dalam bidangnya masing-masing, termasuk untuk menjaga jarak dengan kegiatan politik praktis.

Jajaran POLRI juga terus berusaha meningkatkan kemampuan profesi mereka. Menjawab kegelisahan masyarakat terhadap maraknya ancaman terorisme, jajaran POLRI bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, berhasil membongkar, menangkap, menyelidik dan menyidik, serta menyerahkan kepada pihak Kejaksaan para tersangka pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Khusus di daerah-daerah yang menghadapi ancaman gerakan separatis bersenjata, satuan-satuan TNI bersama satuan-satuan POLRI melancarkan operasi pemulihan keamanan. Tugas keamanan ini cukup berhasil, sehingga sampai saat ini keutuhan wilayah kita masih tetap terpelihara, khususnya menghadapi gerakan separatis di beberapa daerah.

Khusus mengenai ancaman separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam, operasi terpadu yang dilancarkan pemerintah yang meliputi operasi pemulihan keamanan untuk menghadapi gerakan separatis bersenjata GAM, operasi penegakan hukum, operasi pemantapan pemerintahan, serta operasi kemanusiaan dan pemulihan ekonomi, telah dapat menekan ancaman separatisme tersebut sampai tahap yang paling minimum. Karenanya, walaupun belum seluruhnya mencapai sasaran, saat ini tanggungjawab keamanan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam telah dapat dialihkan dari Penguasa Darurat Militer ke Penguasa Darurat Sipil.

Tugas pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah tugas yang ringan. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk merekrut, melatih, menyusun, memperlengkapi, serta menugaskan satuan-satuan TNI dan POLRI, agar dapat menunaikan tugas pokoknya secara memadai. Kita semua mengetahui terbatasnya kemampuan untuk itu. Hanya untuk keperluan yang amat mendesak, sekedar untuk mengganti pesawat-pesawat yang sudah tua, dalam tahun-tahun terakhir ini pemerintah melakukan pengadaan 4 buah pesawat tempur Sukhoi serta 2 buah pesawat helikopter tempur MI-35. Kita berharap, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan seiring dengan peningkatan kemampuan, kita secepatnya menggenapkan kekuatan udara tersebut masing-masing hingga mencapai satu skuadron. Betapapun mahal biaya yang harus dialokasikan untuk membangun dan mengerahkan kekuatan pertahanan dan keamanan, namun harus disadari, bahwa itulah salah satu konsekuensi hidup bernegara. Keamanan dan ketertiban adalah prakondisi yang mutlak diperlukan untuk berfungsinya bidang-bidang lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengenai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dapat saya sampaikan bahwa dalam kasus Timor Timur 1999, telah diperiksa dan diputuskan pengadilan, beberapa diantaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kecuali kasus Trisakti dan Semanggi yang hingga saat ini masih dimintakan pelengkapannya kepada Komnas HAM, penyelesaian

kasus-kasus Tanjung Priok dan Abepura pada saat ini juga sudah diajukan ke Pengadilan.

Saya mengikuti dari dekat dan menyimak dengan sungguh-sungguh wacana ataupun pendapat-pendapat tentang proses peradilan HAM ini. Saya mengetahui, disana-sini terdapat ungkapan atau bahkan rasa tidak puas terhadap proses dan putusan badan peradilan tersebut. Melalui kesempatan ini saya ingin mengemukakan, bahwa sampai titik tertentu, kita memang harus menghormati apapun putusan badan-badan peradilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara HAM. Sesuai dengan semangat reformasi, pemerintah bersikap konsisten dan tidak mencampuri fungsi serta kewenangan badan peradilan. Demikianlah salah satu esensi reformasi, ketika kita semua harus menjaga agar tiga pilar penopang kekuasaan negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat berdiri dan berfungsi dalam kesetaraan.

Sebagai bangsa kita maklum, betapa beratnya penyelesaian kasus-kasus HAM seperti itu. Berbeda dengan akibat dari tindak kriminal pada umumnya, perkara yang ditinggalkan oleh pelanggaran HAM cenderung meninggalkan bekas luka yang dalam. Karena itulah, untuk menyelesaikan beban sejarah kita dalam menangani masalah pelanggaran HAM, terutama sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, Pemerintah telah mengajukan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk dibahas dan disetujui oleh DPR RI dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Masalah nasional lainnya yang masih terus ditangani adalah penegakan hukum, khususnya dalam memberantas korupsi. Kita tidak kekurangan peraturan perundang-undangan untuk pemberantasan korupsi dan lain-lain tindak tercela. Kita juga tidak kekurangan lembaga serta personil yang mempunyai tanggungjawab dalam pencegahan dan pemberantasannya. Namun adalah merupakan kenyataan bahwa kinerja kita dalam pemberantasan korupsi masih jauh dari cukup. Sekalipun demikian, semua itu juga tidak berarti pemerintah tidak

melakukan tindakan apapun. Antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Kejaksaan Agung telah mengajukan ke pengadilan 52 kasus yang terkait dengan BLBI dan 54 kasus non-BLBI. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan juga telah mengajukan perkara dalam jumlah yang terus meningkat. Bila pada tahun 2001 diajukan sebanyak 208 perkara, dalam tahun 2002 sebanyak 434 perkara, dan selama tahun 2003 sampai dengan awal April 2004 sebanyak 778 perkara. Hingga kini pun, perkara-perkara tersebut belum semuanya memperoleh putusan badan peradilan.

Seperti halnya dengan kasus-kasus HAM, saya juga percaya tidak ada di antara kita yang puas dengan lambatnya penyelesaian kasus-kasus hukum itu. Namun seperti telah saya jelaskan, putusan akhir dari seluruh rangkaian proses hukum seperti itu, memang berada di tangan badan peradilan yang jelas-jelas berada diluar jangkauan kewenangan pemerintah.

Capaian lain dalam bidang ini adalah kian terwujudnya stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam pemantapan hubungan pemerintah di pusat dan di daerah. Desentralisasi berbagai kewenangan pemerintahan terus berlangsung, dan dari waktu ke waktu pelaksanaan otonomi juga semakin memperoleh bentuknya. Harus diakui, disana-sini masih dirasa kekurangan, dan untuk itu pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang bagi penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Bertolak dari pengalaman selama ini, penyempurnaan kedua undang-undang tersebut selain dimaksudkan untuk memperbaiki beberapa kelemahan atau kekurangan, terutama juga diarahkan untuk meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek wawasan kebangsaan dan kenegaraan kita. Tujuannya jelas, agar pelaksanaan konsepsi otonomi yang pada dasarnya baik dan tepat, tidak malah menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, serta terhadap keutuhan NKRI itu sendiri.

Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Sidang yang saya muliakan,

Mengenai hubungan luar negeri dapat saya sampaikan bahwa sesuai dengan salah satu program kerja pemerintahan yang saya pimpin, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sedari awal kita arahkan pada upaya pemulihan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri. Kita semua ingat, betapa kesulitan moneter yang berimbas pada timbulnya kesulitan yang bersifat multi dimensi, telah mendorong timbulnya gejolak sosial yang sangat menyedihkan. Hampir setiap dari kita merasa prihatin, ketika bangsa-bangsa lain melontarkan pandangan yang berkesan cemo'oh dan merendahkan, sebagai akibat tindakan tadi. Banyak diantara warga kita yang karena rasa takut, mengungsikan diri dan keluarga mereka ke luar negeri. Banyak para pemodal yang memindahkan usaha dan modal mereka ke negara lain. Banyak bangsa dan pemerintah negara lain yang menimbang hubungan mereka dengan sikap ragu, dan sebagian lagi kurang percaya. Demikianlah gambaran keadaan waktu itu.

Melalui kesungguhan, kerja keras, dan ketekunan dalam meyakinkan para pemimpin pemerintahan, dunia usaha, ataupun banyak kelompok masyarakat dalam setiap kunjungan ke luar negeri, Alhamdulillah, kita dapat memperbaiki dan memulihkan kepercayaan itu. Cara pandang terhadap bangsa dan nama baliq Indonesia, kini berangsur pulih. Rasanya tidak ada lagi rasa enggan atau risih yang menyertai ketika sekarang, setiap dari kita, bepergian ke luar negeri.

Perwujudan prinsip bebas dan aktif juga kita wujudkan melalui penyeimbangan hubungan dengan negara-negara di dunia ini. Kita tidak hanya memelihara dan meningkatkan hubungan bilateral kita dengan negara-negara yang dahulu dikenal sebagai blok barat, tetapi juga dengan lainnya. Kita merajut kembali dan meningkatkan hubungan dengan Rusia dan banyak negara yang semula dikenal sebagai anggota blok timur, dengan Republik Rakyat Tiongkok, dengan Korea Utara, dan bahkan Mongolia. Tidak sebatas hubungan antar pemerintah, kita bahkan mendorong, utamanya

kalangan usaha kita, untuk tampil dan mengambil prakarsa lebih banyak guna mengisi dengan kerjasama perdagangan.

Hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, dan Timur Tengah juga terus berkembang baik dalam kerangka bilateral maupun melalui kerjasama antar organisasi kawasan dan kerjasama multilateral lainnya. Khusus di Timur Tengah, kita tetap mempertegas sikap Indonesia yang secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam perlawanannya terhadap Israel. Dalam kasus Irak, sejak taraf yang paling awal kita juga mengecam dengan keras tindakan sepihak yang mengabaikan proses multilateral melalui PBB. Kita juga mendukung keputusan Dewan Keamanan yang menyetujui Resolusi 1546 (2004), yang menjadi landasan bagi proses transisi ke arah pengakhiran pendudukan asing dan pemulihan sepenuhnya kedaulatan Irak sebagai negara.

Kita mempunyai hubungan diplomatik dengan 40 dari 53 negara di Afrika, dan membuka 16 buah perwakilan. Dengan negara-negara tersebut, kita melancarkan program Kerjasama Teknik Negara Berkembang (KTNB).

Seperti hubungan bilateral kita dengan Amerika Serikat, hubungan kita dengan negara-negara Eropa Barat selama kurun waktu 2001- 2004 ini berjalan baik dan bermanfaat, antara lain berupa dukungan yang diberikan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan negara-negara tersebut, kita juga bekerjasama dalam penanggulangan terorisme, dukungan terhadap reformasi hukum, kepolisian, pengadilan, dan bantuan-bantuan lainnya dalam rangka serta gerakan reformasi nasional.

Peran kita dalam berbagai fora baik bilateral maupun multilateral, terus membaik dan kian diterima lagi secara luas. Di ASEAN, yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan politik luar negeri kita, Indonesia kembali dapat menunjukkan kepemimpinannya. Keberhasilan Indonesia selama KTT ke 9 dalam mencetuskan *Bali Concord II*, meneguhkan peran, komitmen, dan kepemimpinan Indonesia terhadap ASEAN. Sebagai pilar utama politik luar

negerinya, Indonesia berperan aktif dalam: 1) membentuk masyarakat ASEAN pada tahun 2020, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu: Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC); Masyarakat Keamanan ASEAN (ASC); dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC); 2) meningkatkan hubungan bilateral baik dengan dan antar negara-negara ASEAN maupun dengan negara-negara Asia Timur, khususnya Jepang, Korea Selatan, dan RRC; 3) meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat dengan Australia, Selandia Baru, Timor Leste, dan negara-negara Pasifik lainnya, yang tergabung dalam *Pacific Islands Forum* dan *Southeast Pacific Dialogue*.

Peran kita bersama negara-negara anggota ASEAN dalam dialog dengan para mitra, juga terus meningkat. Begitu pula peran dalam banyak fora multilateral seperti GNB dan OKI. Pikiran kita untuk memberi isi hubungan antar negara, khususnya melalui kerjasama antar organisasi sub kawasan, dengan kegiatan yang lebih bersifat substantif dan nyata, terutama di bidang ekonomi dan kebudayaan, semakin memperoleh dukungan. Dalam rangka peringatan 50 tahun Konferensi Asia-Afrika yang akan berlangsung tahun depan, Indonesia bersama Afrika Selatan juga memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika II. Sasarannya sederhana, antara lain dan terutama untuk membangun jembatan bagi terselenggaranya kerjasama kongkrit tadi.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sidang yang saya muliakan,

Izinkan sekarang saya beralih ke bagian kedua dari Pidato Kenegaraan ini, yaitu mengantar RAPBN 2005.

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hari ini pemerintah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2005 beserta dokumen Nota Keuangan. RAPBN ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2005 yang telah dibahas dengan Panitia Anggaran Dewar! Perwakilan Rakyat, sebagai rencana tahun pertama pelaksanaan pembangunan, setelah

berakhirnya Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004.

Dibandingkan dengan penyusunan RAPBN sebelumnya, penyusunan RAPBN 2005 mempunyai sifat yang khusus, karena: *Pertama*, harus memenuhi mekanisme pembahasan dan format baru yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Kedua*, yang lebih mendasar, adalah bahwa pada waktu penyusunan RAPBN 2005, kita berada dalam masa transisi dari Pemerintah dan DPR yang sekarang ke Pemerintah dan DPR hasil Pemilu Tahun 2004. Rangkaian kegiatan Pemilu tahun 2004 sampai sekarang belum selesai, sementara itu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RUU APBN 2005 beserta Nota Keuangan harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus 2004.

Dalam situasi yang khusus ini, melalui kerja keras para anggota Dewan bersama Pemerintah telah dicapai berbagai kesepakatan awal yang menjadi dasar perhitungan RAPBN 2005 yang saya sampaikan hari ini. Penyusunan RAPBN 2005 dengan demikian dilakukan selain untuk dapat menjamin kesinambungan fiskal, juga untuk memberi ruang yang cukup bagi Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 nanti untuk menentukan prioritas kebijakan dalam APBN 2005. Kita menyadari sepenuhnya bahwa hak untuk melakukan perubahan-perubahan APBN 2005 sesuai dengan prioritas kebijakan fiskal sepenuhnya berada di tangan Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004. Dan kita, yang hingga hari ini masih bertugas hingga akhir masa bakti sebentar lagi, dengan segenap rasa syukur akan berlalu dengan meninggalkan pondasi yang lebih mantap bagi pemerintahan baru yang akan datang.

Dengan latar belakang penyusunan RAPBN 2005 tersebut, sekarang saya ingin menyampaikan garis besar RAPBN 2005 dan dokumen Nota Keuangan.

Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, penyusunan RAPBN 2005 ini juga dilandaskan pada beberapa asumsi. Kinerja ekonomi

Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan akan tetap baik, sebagaimana tampak dari tetap terpeliharanya kepercayaan pasar selama pemilihan umum. Sasaran pertumbuhan ekonomi 4,8 % diperkirakan akan dapat dicapai, yang ditopang oleh konsumsi dan lingkungan eksternal yang kondusif. Dengan stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, inflasi dalam tahun 2004 diperkirakan akan terjaga disekitar 7 %. Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan diperkirakan akan sedikit berkurang sejalan dengan mulai meningkatnya impor, sementara neraca pembayaran diperkirakan akan tetap mempunyai surplus sekitar 2,3 % terhadap PDB. Cadangan devisa diperkirakan akan mencapai sekitar 33,2 miliar dollar AS pada posisi akhir tahun atau setara dengan 5,4 bulan lebih kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Sementara itu perekonomian dunia dalam tahun 2004 ini akan mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam empat tahun terakhir. Hal ini didukung oleh membaiknya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, masih tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan pemulihan ekonomi Jepang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Sebaliknya, tahun 2005 diperkirakan akan diwarnai oleh kecenderungan meningkatnya suku bunga global dan upaya perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Semua itu juga diperkirakan akan menyebabkan perkembangan perekonomian dunia tahun 2005 tidak akan tumbuh sekuat tahun 2004.

Pada tahun 2005, kebijakan fiskal yang ekspansif dari negara-negara maju diperkirakan masih akan mendukung tingkat produksi global yang tinggi. Perekonomian negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa diperkirakan masih cukup kuat. Perekonomian negara-negara industri maju diperkirakan tumbuh sekitar 3,1 %, dengan perekonomian Amerika Serikat sebagai motor penggerak utama diperkirakan tumbuh 3,9 %. Adapun perekonomian negara-negara berkembang pada tahun 2005 diperkirakan tumbuh 5,9 % dengan perekonomian Asia terutama Tiongkok sebagai penggeraknya.

Dari sisi domestik, terciptanya stabilitas makro ekonomi dan membaiknya kondisi sosial politik dan keamanan, diharapkan dapat

semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal ini terefleksi antara lain pada menurunnya premi resiko dan membaiknya peringkat utang. Harga minyak dunia yang saat ini sangat tinggi, diperkirakan akan menurun pada tingkat yang wajar seiring peredaan beberapa ketegangan di dunia.

Dalam tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2004, dan diperkirakan akan mencapai 5,4 %. Pertumbuhan tersebut diperkirakan masih tetap akan didukung oleh peningkatan konsumsi di dalam negeri, disamping peningkatan ekspor, dan membaiknya gairah investasi. Sasaran pertumbuhan sebesar itu masih tetap dibawah potensi perekonomian Indonesia, dan masih belum cukup untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara berarti. Sekalipun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan akan terus meningkat setelah tahun 2005 sejalan dengan diatasinya berbagai hambatan yang ada.

Selanjutnya melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi dari dalam negeri, dan dengan memperhatikan prospek perkembangan keuangan internasional, termasuk perkembangan dollar AS, nilai tukar rupiah selama tahun 2005 diperkirakan akan tetap stabil dalam kisaran Rp 8.600 per dollar AS.

Dengan menyimak berbagai kecenderungan tadi, pemerintah dan Panitia Anggaran juga sepakat sasaran laju inflasi tahun 2005 diperkirakan akan dapat dikendalikan pada tingkat 5,5 %. Perkiraan inflasi ini lebih rendah apabila dibanding dengan perkiraan dalam APBN 2004 sebesar 6,5 %. Sejalan dengan perkiraan inflasi tersebut, dengan mempertimbangkan masih adanya resiko ketidakpastian, suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 6,5 % dalam tahun 2005. Sementara itu realisasi suku bunga SBI 3 bulan tahun 2004, diperkirakan lebih rendah dari yang diasumsikan semula yaitu sebesar 7,6 %. Asumsi harga minyak Indonesia akan ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan produksi minyak Indonesia dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai sekitar 1,125 juta barel per hari.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat,

Secara umum, kebijakan ekonomi makro dalam tahun 2005 tetap diarahkan kepada tiga bidang; *Pertama*, stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang pruden; *Kedua*, melanjutkan pemantapan sektor keuangan dengan mengutamakan peningkatan kinerja dan ketahanan bank-bank, lembaga-lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan dan sebagainya, serta pasar modal; Dan *Ketiga*, mempercepat upaya memperbaiki iklim usaha dan investasi.

Di bidang keuangan, upaya untuk menyempurnakan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, pengefektifan sistem pengawasan, penerapan *good corporate governance*, dan konsolidasi sektor-sektor keuangan yang di lakukan dalam tahun 2004, akan ditingkatkan dalam tahun 2005. Termasuk dalam kebijakan sektor keuangan ini adalah implementasi secara bertahap dan hati-hati atas pelaksanaan transisi dari sistem penjaminan penuh (*blanket guarantee*) kepada lembaga penjamin simpanan. Kebijakan sektor keuangan ini juga terlaksana semakin baik dengan selesainya amandemen Undang-undang Bank Indonesia, yang diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kebijakan dari Bank Indonesia.

Dalam tahun 2005, pemerintah melanjutkan langkah-langkah yang telah diambil dalam tahun 2004 untuk memperkuat landasan bagi iklim usaha yang menggairahkan investasi. Upaya ini mencakup pemantapan situasi keamanan dan ketertiban, kelanjutan langkah-langkah reformasi hukum, perbaikan iklim perburuhan, perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan, perbaikan prasarana ekonomi, pencabutan ketentuan-ketentuan pusat dan daerah yang menghambat investasi dan perdagangan, dan sebagainya.

Dengan beberapa asumsi tadi, berikut ini saya sampaikan pokok-pokok dalam RAPBN 2005 di bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Anggaran.

Peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, dan untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Rasio penerimaan perpajakan terhadap

PDB juga meningkat dari 11,9 % pada tahun 2001 menjadi 13,6 % dalam APBN 2004. Pada saat ini pemerintah sedang mempersiapkan amandemen UU Perpajakan untuk di babas dengan DPR dan diharapkan dapat diberlakukan efektif pada tahun 2005. Rancangan Amademen UU Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pada dasarnya dimaksudkan untuk melanjutkan reformasi di bidang perpajakan dan administrasi perpajakan.

Sementara itu, langkah penyempurnaan administrasi kepabeanan meliputi: 1) kelanjutan prakarsa fasilitasi perdagangan, dan 2) prakarsa pemberantasan penyelundupan dan *undervaluation*. Dibidang cukai rokok, pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan yang ada sekarang serta terns melanjutkan upaya-upaya administratif berupa pemberantasan rokok palsu dan pita cukai palsu. Sejalan dengan kebijakan ini pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah sistematis dalam memberantas *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing*.

Upaya peningkatan di bidang penerimaan bukan pajak (PNBP) diperkirakan mengalami penurunan karena: *Pertama*, penerimaan sumber daya alam yang bersumber dari minyak bumi dan pertambangan umum yang saat ini sedang dalam pengembangan investasi baru; *Kedua*, penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan masih dalam program pengurangan jumlah penebangan guna pelestarian hutan dan lingkungan; *Ketiga*, terbatasnya penerimaan deviden dari BUMN. Sektor-sektor PNBP lain yang masih berpotensi untuk ditingkatkan antara lain bersumber dari sektor gas alam dan dari jasa telekomunikasi, seperti pendapatan hak dan perizinan dari penyelenggaraan telekomunikasi.

Secara keseluruhan, pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp 377,9 triliun atau naik sebesar Rp 28 triliun (8 %) dibandingkan tahun 2004. Sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 297,5 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 79,6 triliun. Jumlah tersebut sekitar 78,7 % dari total penerimaan negara dan hibah tahun 2005. Kontribusi penerimaan sektor perpajakan yang semakin meningkat tersebut, menunjukkan

bahwa pemerintah tetap konsisten untuk terus menggali sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri dalam rangka mewujudkan kemandirian APBN.

Dari jumlah tersebut, penerimaan PPh diperkirakan sekitar Rp 141,9 triliun atau naik 5,9 % dibandingkan APBN 2004. Sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM diperkirakan sekitar Rp 98,8 triliun atau naik sebesar 14,6 % dibandingkan tahun 2004. Selanjutnya, penerimaan cukai diperkirakan sebesar Rp 28,9 triliun.

Dari sisi belanja negara, sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, dimulai penerapan sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran. Penggabungan belanja rutin (terutama gaji dan belanja barang) dengan belanja pembangunan dimaksudkan untuk mengurangi alokasi yang tumpang tindih. Walau hasilnya mungkin baru dapat dinikmati beberapa tahun lagi, saya yakin upaya ini dapat menghemat dan mengurangi praktek KKN di bidang keuangan negara. Untuk itu, Pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 nanti diharapkan dapat melanjutkan proses konsolidasi tersebut.

Sekiranya diperlukan penyesuaian yang menyangkut kebijakan strategis seperti di bidang belanja pegawai, subsidi BBM dan belanja daerah, serta beberapa prioritas sektoral lainnya, hal itu diserahkan kepada pemerintah yang akan datang untuk melakukannya dalam bentuk revisi APBN. Sesuai dengan pandangan dan titik tolak pemikiran seperti itu, dalam RAPBN 2005 alokasi untuk belanja pegawai ditetapkan Rp 62,2 triliun atau meningkat 8,7 % dibandingkan tahun 2004, dan belanja barang sebesar Rp 31 triliun atau turun 12,9 % dari tahun 2004. Kenaikan belanja pegawai tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki besaran manfaat tunjangan hari tua (THT) pegawai negeri setelah memasuki masa pensiun, pembayaran beban iuran pensiun, dan penyediaan anggaran untuk penerimaan pegawai baru, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan dan agama.

Masih dalam kelompok belanja negara ini adalah anggaran untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp 64 triliun, yang terdiri dari bunga

utang dalam negeri Rp 38,8 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 25,1 triliun. Dibandingkan tahun 2004, keseluruhan beban bunga utang tersebut menunjukkan penurunan 2,6 %.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pembangunan nasional dianggarkan belanja modal Rp 43 triliun, yang berarti kenaikan 8 % dari anggaran yang sama tahun 2004. Belanja modal tersebut akan digunakan untuk kegiatan investasi sarana dan prasarana pembangunan, yaitu dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta belanja modal fisik lainnya.

Dalam tahun 2005 dianggarkan subsidi sebesar Rp 33,6 triliun, atau 26,3 % lebih tinggi dibandingkan anggaran subsidi tahun 2004. Pemberian subsidi ini dilakukan antara lain untuk membantu masyarakat kurang mampu serta usaha kecil dan menengah, membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum, dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu. Sebagian besar anggaran subsidi dialokasikan melalui BUMN tertentu dalam bentuk harga yang lebih murah untuk barang dan jasa yang disubsidi, seperti PT Pertamina sebesar Rp 21 triliun yang diprioritaskan pada minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga; Perum Bulog sebesar Rp 5,9 triliun untuk subsidi pangan bagi sekitar 8,3 juta keluarga miskin dan menjalankan penugasan mengelola stok beras nasional; PT PLN sebesar Rp 3,4 triliun untuk subsidi listrik bagi pelanggan listrik dengan daya terpasang sampai 450 VA dan konsumsi listrik dibawah 60 kwh/bulan; beberapa BUMN di bidang pupuk sebesar Rp 1,3 triliun untuk subsidi pupuk; serta beberapa BUMN lainnya sebesar Rp 0,8 triliun untuk menjalankan penugasan pemerintah di bidang pelayanan umum. Di luar itu, disediakan subsidi sekitar Rp 1,2 triliun yang disalurkan melalui perusahaan negara berbentuk lembaga keuangan untuk mengelola subsidi bunga kredit program.

Terhadap besaran dan kebijakan subsidi tersebut, saya mencatat adanya kesepakatan dengan Dewan yang terhormat, bahwa sistem subsidi harga memang sebaiknya dapat secara berangsur-angsur dialihkan ke subsidi yang lebih tepat sasaran.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat,

Rincian pagu anggaran belanja pemerintah pusat dalam nota keuangan dan RAPBN 2005 diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja, organisasi dan fungsi. Selanjutnya, secara ringkas saya akan menguraikan anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi organisasi. Rincian anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi yang lain, dapat diperiksa dalam dokumen Nota Keuangan yang menjadi lampiran Pidato ini.

Keseluruhan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 264,9 triliun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2004. Belanja pemerintah pusat tersebut dialokasikan pada sekitar 66 kementerian dan lembaga. Dari sejumlah kementerian dan lembaga tersebut, beberapa diantaranya akan memperoleh pagu anggaran belanja yang relatif besar guna mendanai kegiatan operasional dan non-operasional, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar rakyat berupa pelayanan ketertiban dan keamanan, pelayanan pendidikan, pelayanan permukiman, dan pelayanan kesehatan.

Pertama, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi pagu sekitar Rp 22 triliun atau 2,8 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2004, yang antara lain dialokasikan untuk menjalankan program pengembangan pertahanan integratif, program pengembangan potensi dukungan pertahanan, serta program pengembangan matra darat, laut, dan udara. Anggaran ini diperlukan untuk menjaga integritas wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping untuk pemberian santunan kepada keluarga prajurit yang gugur atau carat tetap dalam menjalankan tugas.

Kedua, Kementerian Pendidikan Nasional memperoleh sekitar Rp 21,5 triliun atau naik sebesar 12 % dibandingkan tahun 2004, yang antara lain digunakan untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan tinggi, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, serta program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan. Dalam kesempatan ini saya

menyampaikan bahwa alokasi dana pendidikan seperti amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara gradual sudah tertampung dalam RAPBN 2005.

Ketiga, Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah mendapat sekitar Rp 12,4 triliun atau meningkat sebesar 3,3 % dibandingkan tahun 2004, yang antara lain akan digunakan untuk menjalankan program peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, serta program pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Keempat, POLRI mendapat sekitar Rp 11,2 triliun atau meningkat sebesar 5,7 % dibandingkan tahun 2004, yang antara lain akan digunakan untuk menjalankan program pemeliharaan Kamtibmas, program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, pemberian santunan terhadap anggota yang gugur atau cacat tetap dalam menjalankan tugas, serta program pengembangan sumberdaya kepolisian.

Kelima, Kementerian Kesehatan mendapat alokasi sekitar Rp 7,4 triliun atau meningkat sebesar 10,4 % dibandingkan tahun 2004, yang antara lain digunakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat.

Selain lima kementerian tersebut, rincian pagu anggaran belanja pemerintah pusat untuk kementerian lainnya, dapat dilihat lebih seksama dalam buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun 2005.

Di bidang belanja daerah, langkah-langkah kebijakan yang diusulkan pada tahun 2005, antara lain, dengan dasar Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) diarahkan untuk memperkecil ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dengan tetap menjaga netralitas fiskal. Dalam RAPBN tahun 2005, belanja untuk daerah dianggarkan sebesar Rp 129,9 triliun, yang terdiri dari dana perimbangan Rp 123,4 triliun,

serta dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 6,5 triliun. Alokasi DAU disepakati sebesar 25,5% dari penerimaan dalam negeri neto, atau sebesar Rp 88,1 triliun. Formula DAU yang sekarang berlaku tetap dijadikan dasar perhitungan dengan upaya-upaya perbaikan akurasi data. Alokasi DBH adalah sebesar Rp 31,2 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 4,1 triliun.

Dalam RAPBN 2005 juga ditingkatkan peranan dan alokasi DAK secara selektif dan bertahap, dengan tetap memperhatikan prioritas nasional. Pemerintah dan Panitia Anggaran juga telah sepakat untuk mengalihkan dana dekonsentrasi ke DAK secara bertahap yakni ke program dan kegiatan yang kewenangannya telah berada di daerah. Saya minta kepada daerah penerima DAK tersebut memanfaatkannya dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar tertuju untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut, maka RAPBN 2005 akan mengalami defisit anggaran sekitar Rp 16,9 triliun atau 0,8 % dari PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran defisit pada APBN 2004, yakni sebesar Rp 24,4 triliun atau 1,2 % dari PDB. Penurunan besaran defisit dan rasionya terhadap PDB tahun 2005 tersebut, mencerminkan besarnya kesungguhan dan komitmen pemerintah dalam melanjutkan program dan langkah-langkah konsolidasi fiskal untuk memantapkan upaya peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan.

Meskipun besaran defisit anggaran dalam RAPBN 2005 lebih rendah dari sasaran dalam APBN 2004, akan tetapi tantangan yang dihadapi di sisi pembiayaan tidaklah semakin ringan. Pembiayaan yang perlu disediakan tidak hanya dibutuhkan untuk menutupi defisit APBN semata-mata, akan tetapi juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005, dalam jumlah yang makin besar. Kebutuhan pembiayaan tersebut akan diupayakan dapat dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri.

Dalam RAPBN 2005, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri direncanakan mencapai Rp 66,7 triliun.

Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri ini direncanakan berasal dari penggunaan saldo rekening pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia, antara lain Rekening Dana Investasi (RDI), dan rekening non-RDI. Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri lainnya direncanakan mencapai Rp 57,7 triliun. Jumlah ini berasal dari: *Pertama*, hasil privatisasi BUMN dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan eks. BPPN; dan *Kedua*, penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Privatisasi BUMN yang akan dilakukan dalam tahun 2005 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program divestasi atau pelepasan saham pemerintah di BUMN pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan aset eks BPPN yang sekarang dikelola oleh PT (Persero) Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) akan diupayakan secara optimal untuk memperoleh hasil dan harga yang terbaik, sesuai dengan kondisi pasar. Dalam hal penerbitan SUN, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dengan DPR-RI, Pemerintah diberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu maupun denominasi mata uangnya dengan mempertimbangkan faktor kondisi pasar, biaya, pengelolaan resiko, dan kebutuhan pembiayaan.

Pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri (bruto) pada tahun 2005 direncanakan Rp 26,6 triliun atau ekuivalen sekitar 3,1 miliar dollar AS. Rencana penarikan pinjaman luar negeri tahun 2005 tersebut terdiri dari pinjaman program dan proyek. Penarikan pinjaman program dan proyek diharapkan terutama dari pinjaman yang telah disepakati dengan donor, yang direncanakan akan dapat dicairkan dalam tahun 2005.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, dan tidak adanya lagi penjadwalan ulang utang luar negeri pemerintah pada tahun 2004 dan 2005, serta sasaran pertumbuhan ekonomi 5,4 %, maka rasio utang luar negeri pemerintah tahun 2005 diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun 2004. Demikian pula, rasio utang dalam negeri diperkirakan juga akan mengalami penurunan. Secara keseluruhan rasio stok utang pemerintah terhadap PDB, nominal akan menurun dari sekitar 60,1 % pada tahun 2004 menjadi sekitar 55 % pada tahun 2005.

Sidang yang saya muliakan,

Demikianlah gambaran umum tentang RAPBN 2005, serta penjelasan ringkas mengenai asumsi ekonomi makro dan berbagai kebijakan yang mendasari penyusunannya. Soya berharap pembahasan RAPBN 2005 akan berjalan lancar sehingga proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita memohon petunjuk dan bimbingan-Nya, agar kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan dalam mengemban amanat rakyat untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI